

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN
KESELAMATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN
TAMBANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970
TENTANG KESELAMATAN KERJA**

**Andronikus Depari
1187037**

ABSTRAK

Salah satu unsur dalam memenuhi pertumbuhan ekonomi adalah apabila seluruh masyarakat Indonesia memiliki pekerjaan yang layak. Dalam bekerja, pihak perusahaan tambang harus memperhatikan sistem keselamatan kerja didalam perusahaannya. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja mengatakan setiap tenaga kerja harus dijamin kesehatan dan keselamatan kerja oleh perusahaan. Tetapi fakta yang ada dilapangan sering terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerja yang bekerja diperusahaan tambang karena kurangnya kesadaran dan perhatian pihak perusahaan terhadap sistem keselamatan kerja. Penegakan hukum akan keselamatan kerja harus dijalankan agar keselamatan kerja bagi pekerja diperusahaan tambang dapat dijamin. Dan perusahaan tambang harus bertanggungjawab akan keselamatan kerja bagi pekerja yang bekerja didalam perusahaan tambang tersebut.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum terhadap kasus yang terjadi dalam perusahaan pertambangan, yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Dengan metode penelitian yuridis normatif ini akan dikaji mengenai konsistensi Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terkait jaminan Keselamatan Kerja terhadap pekerja di perusahaan tambang.

Dari hasil penelitian skripsi ini didapat bahwa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia belum sepenuhnya mengatur mengenai Keselamatan Kerja di perusahaan tambang. Karena didalam Undang-undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja hanya mengatur sanksi kurungan tiga bulan kurungan dan denda sebesar Rp.100.000 kepada perusahaan yang tidak menerapkan sistem keselamatan kerja didalam perusahaan tambang tersebut. Dan didalam Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sama sekali tidak mengatur akan sanksi. Sedangkan dalam Undang-undang No 1 tahun 2009 tentang Minerba hanya menerapkan sanksi pemberhentian sementara perusahaan apabila tidak memperhatikan sistem keselamatan kerja diperusahaan tambang. Hal ini menunjukkan pertanggungjawaban pihak perusahaan tambang masih sangat minim terhadap sistem keselamatan kerja.

Kata Kunci : *Tenaga Kerja, Perusahaan Tambang, Keselamatan Kerja, Tanggungjawab Perusahaan Tambang, Perlindungan Hukum*

***JURIDICAL REVIEW LEGAL PROTECTION FOR SAFETY AND SECURITY
OF LABOR IN MINE ASSOCIATED BY LAW NO 13 OF 2003 CONCERNING
EMPLOYMENT AND LAW No. 1 1970 ON SAFETY***

**Andronikus Depari
1187037**

ABSTRACT

One element in meeting the economic growth is when the whole Indonesian people have decent work. In their work, the mining companies should pay attention to work safety systems within the company. In Act No. 1 of 1970 on Work Safety said all workers must be guaranteed health and safety by company. But the fact that there are frequent accidents in the field of work against the mine workers employed in the company due to lack of awareness and attention of the company towards safety system. Safety law enforcement will be run so that safety for mine workers in the company can be guaranteed. And mining companies should be responsible for the security of employment of workers employed in the mining company.

The method used in this thesis is a normative juridical research or research library. Then associated with legal theories and practice of law to cases that occurred in the mining company, which deals with the problems in this thesis research. With this normative juridical research methods will be assessed on the consistency of Act No. 13 of 2003 on Employment and Act No. 1 of 1970 on Safety Related Work Safety assurance of workers in the mining company.

From the results of this thesis study found that legislation in Indonesia has not fully set on Safety in mining company. Because in Act No. 1 of 1970 on Occupational Safety confinement sanctions only three months in prison and a fine of 100,000 to companies that do not implement the safety systems work in the mining company. And in Act No. 13 of 2003 on Manpower did not set sanctions. While in Act No. 1 of 2009 on Mineral and Coal only apply if the sanction while the company did not pay attention to work safety system in the company mines. This shows the accountability of the mining companies are still very minimal to the safety system.

Keys Words : *Labor, Mining Company, Work Safety, Corporate Responsibility Mine, Legal Protection*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II Tinjauan Pustaka Mengenai Perlindungan dan Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003	22
A. Hubungan Kerja Antara Pekerja dan Pengusaha	22
1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	22
2. Hubungan Antara Pekerja dan Pengusaha.....	26
3. Perjanjian Kerja.....	36
B. Keselamatan Kerja Bagi Pekerja.....	44
1. Keselamatan Kerja.....	44

2. Peran Pengusaha Dalam Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003	46
3. Peran Pemerintah Dalam Keselamatan Kerja.....	49
BAB III Keselamatan Kerja Pada Tenaga Kerja di Perusahaan Tambang	53
A. Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.....	53
1. Pertambangan Sebagai Salah Satu Bidang Pekerjaan	53
2. Pengaturan Bidang Pertambangan Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan	54
B. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja di Bidang Pertambangan	57
2. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja..	57
1. Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003.....	60
C. Akibat Hukum Bagi Pengusaha Yang Tidak Memperhatikan Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.....	63
1. Bagi Pengusaha Yang Tidak Memperhatikan Keselamatan Pekerja.....	63
2. Bagi Pengusaha di Bidang Pertambangan yang tidak memperhatikan keselamatan kerja	66
BAB IV Pertanggungjawaban Perusahaan Tambang Terhadap Keselamatan Kerja dan Pengaturannya Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	71
A. Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Perusahaan Tambang di Indonesia Menurut Undang-Undang di Indonesia.....	71
1. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003.....	71
2. Menurut Undang-Undang Pertambangan Undang-undang No 4 tahun 2009.....	71.
B. Pertanggung Jawaban Perusahaan Tambang Terhadap Keselamatan Kerja...	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
CURRICULUM VITAE	96